



Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS SOSIAL

Jalan Cut Nyak Dhien No. 01 Telp. 0541-661049

TENG GARONG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen Review Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini disusun dalam rangka memberikan gambaran dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Strategis oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu Lima tahun Kedepan, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kurang sempurna dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENSTRA DINAS SOSIAL Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 11 Oktober 2021



Kepala Dinas Sosial
(Kabupaten Kutai Kartanegara)

H. HAMLY, SE

Pembina Tk. 1

NIP. 19640409 199803 1 013

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	45
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	45
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
3.3. Telaahan Renstra Kemensos RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	49
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	52

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	59
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	68
BAB VIII	PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak peningkatan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial, serta upaya pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS). Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS dan pemberdayaan PSKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2021-2026 disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara. Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 5 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia serta kebijakan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun mendatang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang



merupakan dokumen perencanaan teknis dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam merealisasikan janji politik yang pernah dikampanyekan. RPJMD inilah yang kemudian diterjemahkan kedalam perencanaan strategis perangkat daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang cenderung mengalami penurunan dari konsisi awal penyusunan RPJMD yang mengharuskan adanya perubahan target dan sasaran yang ingin dicapai.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan selama 5 tahun kedepan yang diterjemahkan kedalam strategi, kebijakan dan program strategis yang akan dilaksanakan serta menyajikan pendanaan indikatif yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Selanjutnya perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ;
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;

- 
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
 17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
 21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
 22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 23. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

- 
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
 32. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 34. Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.
 35. Peraturan Menteri Sosial 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah

- 
- Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
41. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020-2021 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang mengalami perubahan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) no. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian dijabarkan melalui Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teeknis pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga merupakan Penjabaran Visi Misi Kepala daerah terpilih periode 2021-2024 dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra serta sistematika Penulisan Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas pokok fungsi dan struktur organisasi PD, gambaran tentang sumber daya yang dimiliki, profil kinerja pelayanan berdasarkan SPM, dan faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III ini akan menguraikan tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya akan melakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah terpilih sebagai bahan untuk mengetahui pada sisi mana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat dilaksanakan untuk mendukungnya. Bagian ini juga akan menelaah Renstra Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur sehingga dapat diketahui hubungan dan dukungan Resntra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pencapaian indikator kinerja Renstra Kementerian dan Propinsi. Atas dasar beberapa telaah tersebut nantinya akan dapat diketahui isu-isu



strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV ini akan memuat tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial sampai dengan tahun 2026. Atas dasar pernyataan ini kemudian disusunlah strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V merupakan bab yang berisi bagian teknis karena menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab VI disajikan indikator kinerja utama Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini untuk memudahkan bila nantinya akan dilakukan pengukuran terhadap kontribusi Dinas Sosial dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara langsung diharapkan akan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan fungsi tersebut disusunlah suatu organisasi dalam sebuah Struktur Organisasi Dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian: dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

- 
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

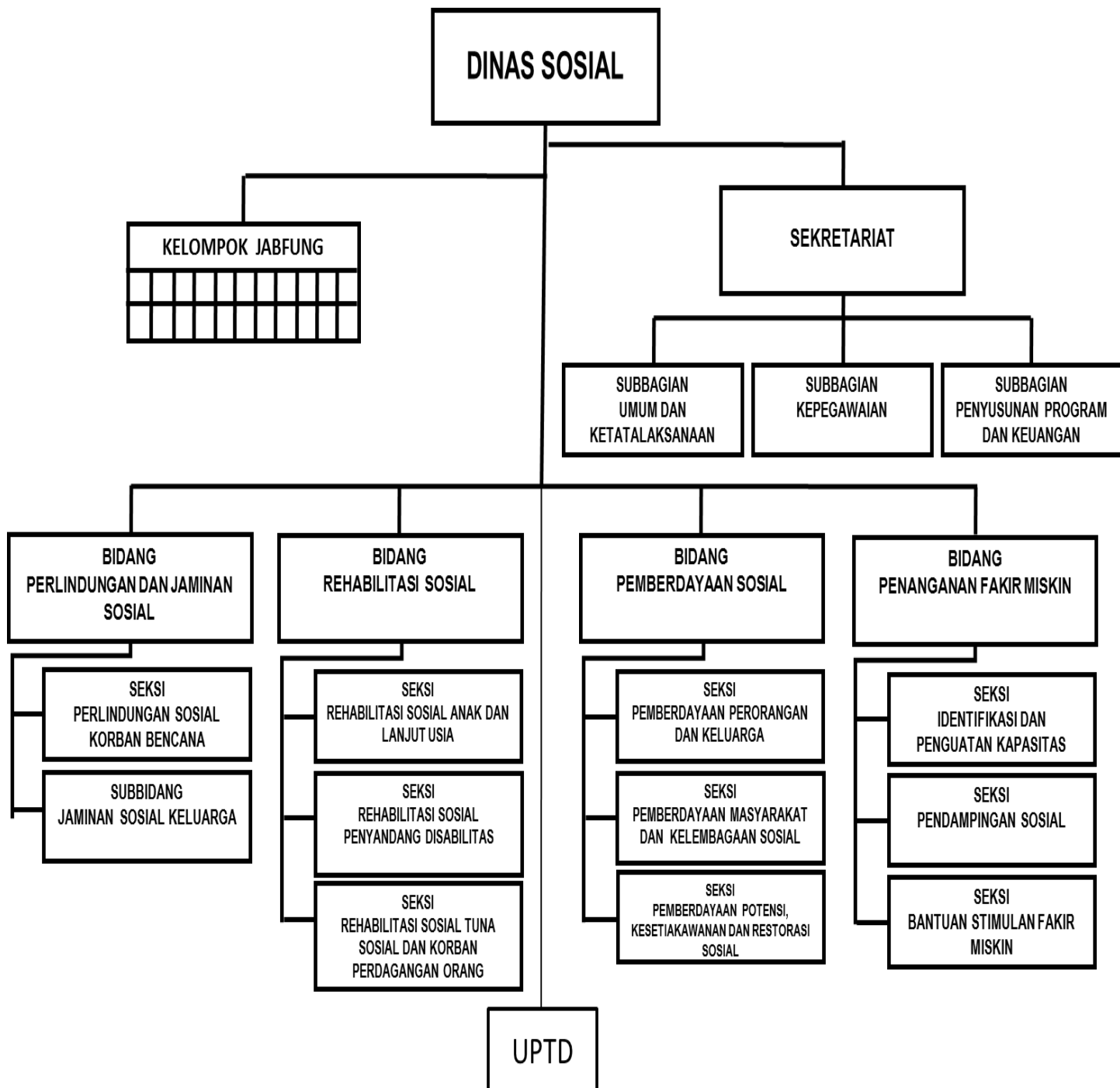
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

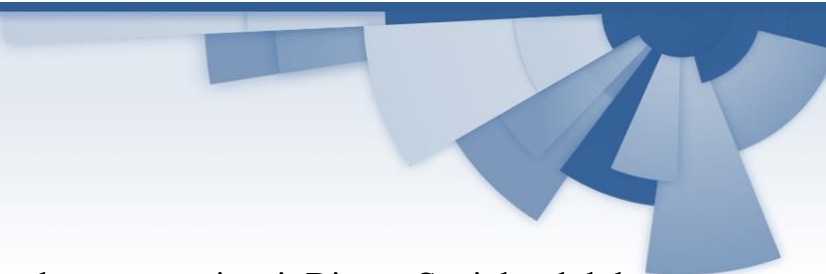
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - 2. Seksi Pendampingan sosial; dan
 - 3. Seksi Bantuan Stimulan fakir miskin;

 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - 1. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak
 - 2. UPTD Loka Bina Karya

 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 :
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara





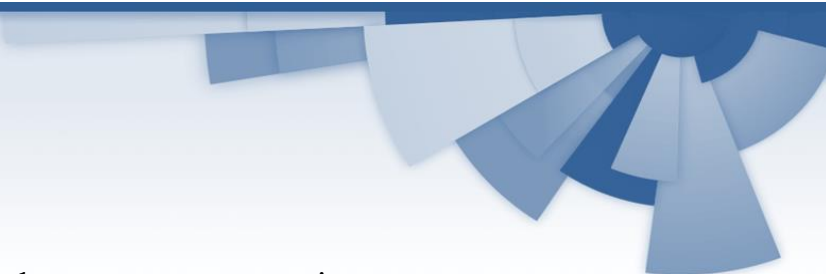
Adapun tata kerja struktur organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Tata kerja Kepala Dinas meliputi :

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Dinas;
- c. Merumuskan rencana program kerja Dinas
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Dinas
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Dinas
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Dinas
- g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Tata kerja Sekretaris meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle

- 
- blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
 - h. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kependudukan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Dinas;
 - k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Dinas
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

3. Tata kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai

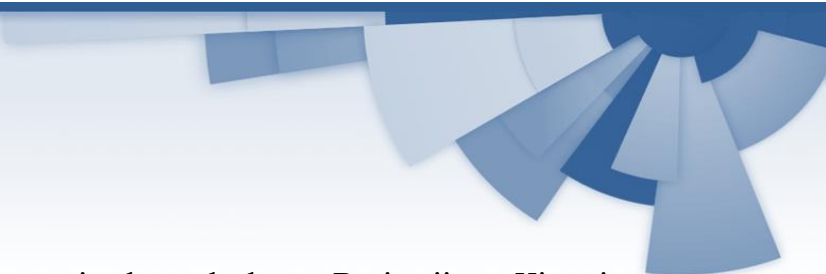


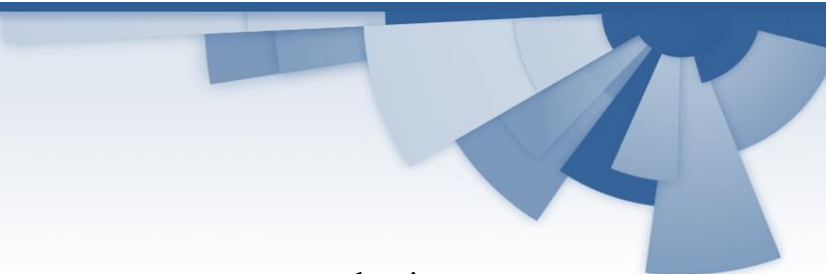
dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD

- e. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- f. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum dan Ketatalaksanaan;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan Ketatalaksanaan;
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

4. Tata kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi :

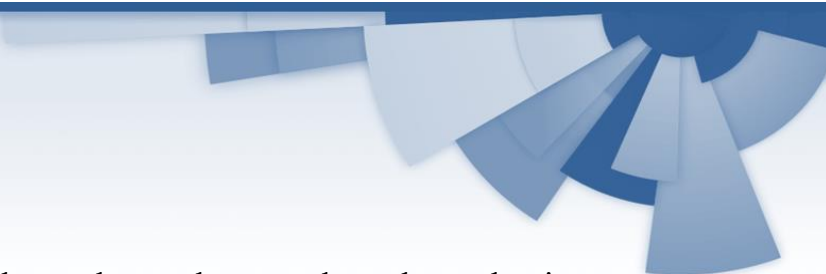
- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. merencanakan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;

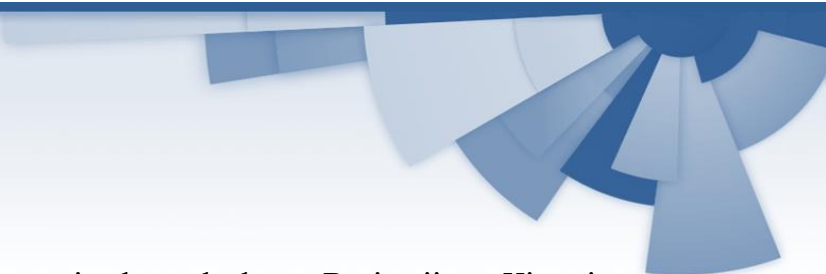
- 
- e. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kepala Dinas;
 - f. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kepegawaian;
 - g. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian;
 - h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
5. Tata kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi :
- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke kepala Badan melalui sekretaris Badan;
 - d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD;
 - e. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM)
 - f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 - g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
6. Tata kerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi :
- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

- 
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Rehabilitasi Sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan tuna sosial dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. mengkoordinasikan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan instansi terkait;
 - f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Rehabilitasi Sosial;
 - g. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial;
 - h. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi Sosial;
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

7. Tata kerja Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. merencanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- d. merencanakan dan Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- e. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia;

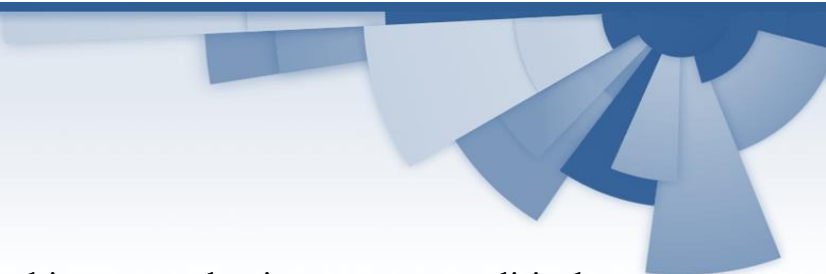
- 
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
8. Tata kerja Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas meliputi :
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 - d. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - e. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - f. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - g. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
9. Tata kerja Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang meliputi :
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. merencanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait.
 - d. merencanakan dan Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

- 
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

10. Tata kerja Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi:

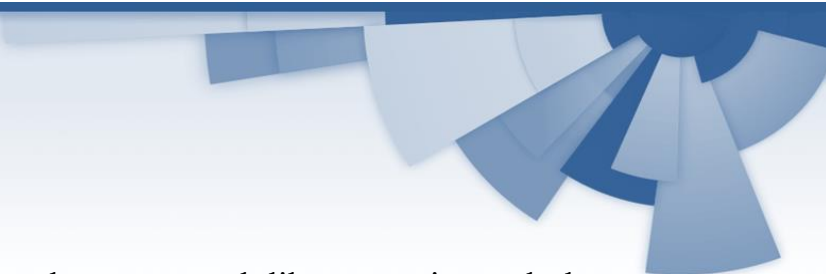
- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang meliputi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. mengkoordinasikan penyusunan bahan pelaksanaan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, jaminan sosial keluarga.
- d. mengkoordinasikan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan korban bencana alam dan bencana sosial, jaminan sosial keluarga.
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- h. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

11. Tata kerja Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana meliputi :

- 
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
 - b. Menyusun rencana kegiatan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang perlindungan sosial korban bencana alam dengan Unit/Instansi terkait.
 - d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
 - e. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
 - f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

12. Tata kerja Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- d. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang jaminan sosial keluarga dengan Unit/Instansi terkait.
- e. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Jaminan Sosial Keluarga.
- f. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Jaminan Sosial Keluarga.
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, dan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Jaminan Sosial Keluarga;

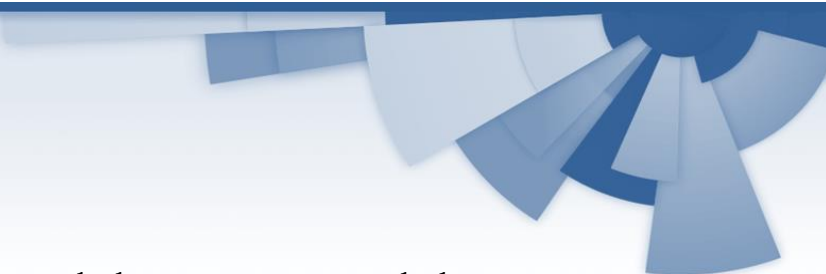
- 
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Jaminan Sosial Keluarga;
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Jaminan Sosial Keluarga;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

13. Tata kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemberdayaan Sosial;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Sosial;
- e. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Sosial;
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

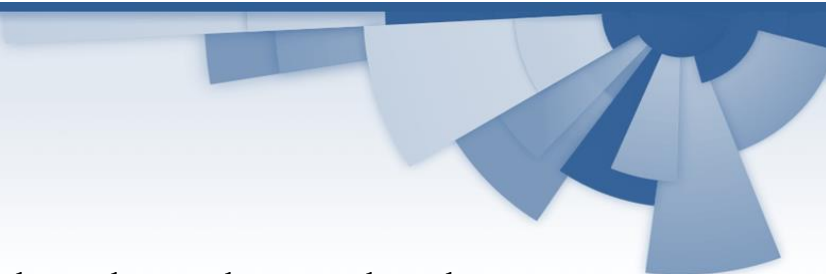
14. Tata kerja Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Merencanakan penyusunan rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga.
- d. Merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga.
- e. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga dengan Unit/Instansi terkait.

- 
- f. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga.
 - g. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga.
 - h. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
 - i. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan perorangan dan Keluarga;
 - j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan perorangan dan Keluarga;
 - k. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

15. Tata kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
- e. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial.
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;

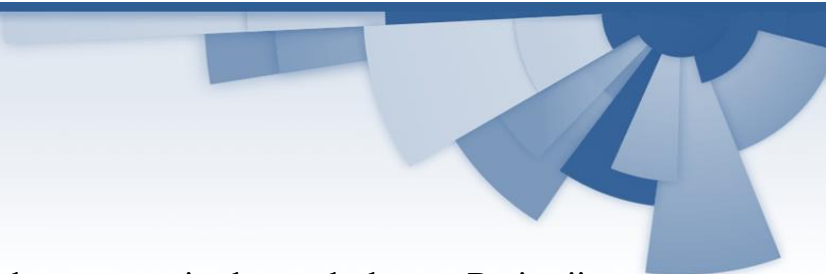
- 
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

16. Tata kerja Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial dengan Unit/Instansi terkait.
- d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial.
- e. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;
- g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

17. Tata kerja Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi :

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan penanganan fakir miskin meliputi Identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan sosial dan bantuan stimulant fakir miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. mengkoordinasikan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin.

- 
- e. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Penanganan Fakir Miskin;
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penanganan Fakir Miskin;
 - g. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penanganan Fakir Miskin;
 - h. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

18. Tata kerja Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, identifikasi dan penguatan kapasitas dengan Unit/Instansi terkait;
- d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
- e. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas.
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

19. Tata kerja Kepala Seksi Pendampingan Sosial meliputi :

- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan

- 
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pendampingan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. merencanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi bidang Pendampingan Sosial dengan Unit/Instansi terkait.
 - d. merencanakan dan Menyiapkan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendampingan Sosial.
 - e. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pendampingan sosial.
 - f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pendampingan Sosial;
 - g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pendampingan Sosial;
 - h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pendampingan Sosial;
 - i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

20. Tata kerja Kepala Seksi Bantuan Stimulan Fakir Miskin meliputi:

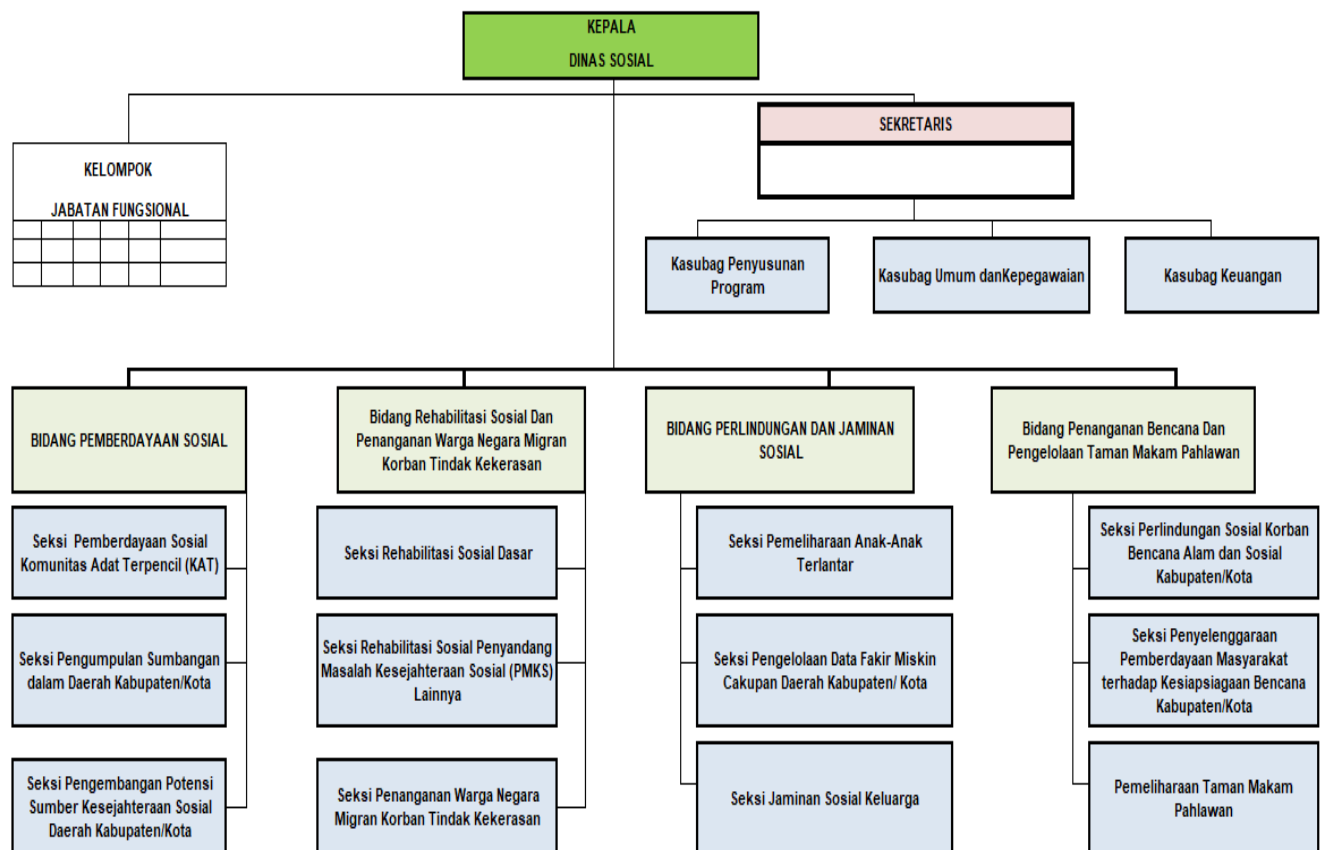
- a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Bantuan Stimulan Fakir Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang bantuan stimulan Fakir Miskin dengan Unit/Instansi terkait.
- d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bantuan Stimulan Fakir Miskin.
- e. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang bantuan stimulan Fakir Miskin.
- f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Bantuan Stimulan Fakir Miskin;
- g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Bantuan Stimulan Fakir Miskin;
- h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Bantuan Stimulan Fakir Miskin;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Dalam Perkembanganya, struktur organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah mengalami perubahan seiring

diberlakukanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta aturan turunannya. Perubahan ini dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian dan penyeragaman Nomenklatur Organisasi Perangkat daerah, Program Kerja, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia.

Untuk Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri struktur kelembagaan yang diusulkan dalam penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

Usulan Perubahan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara



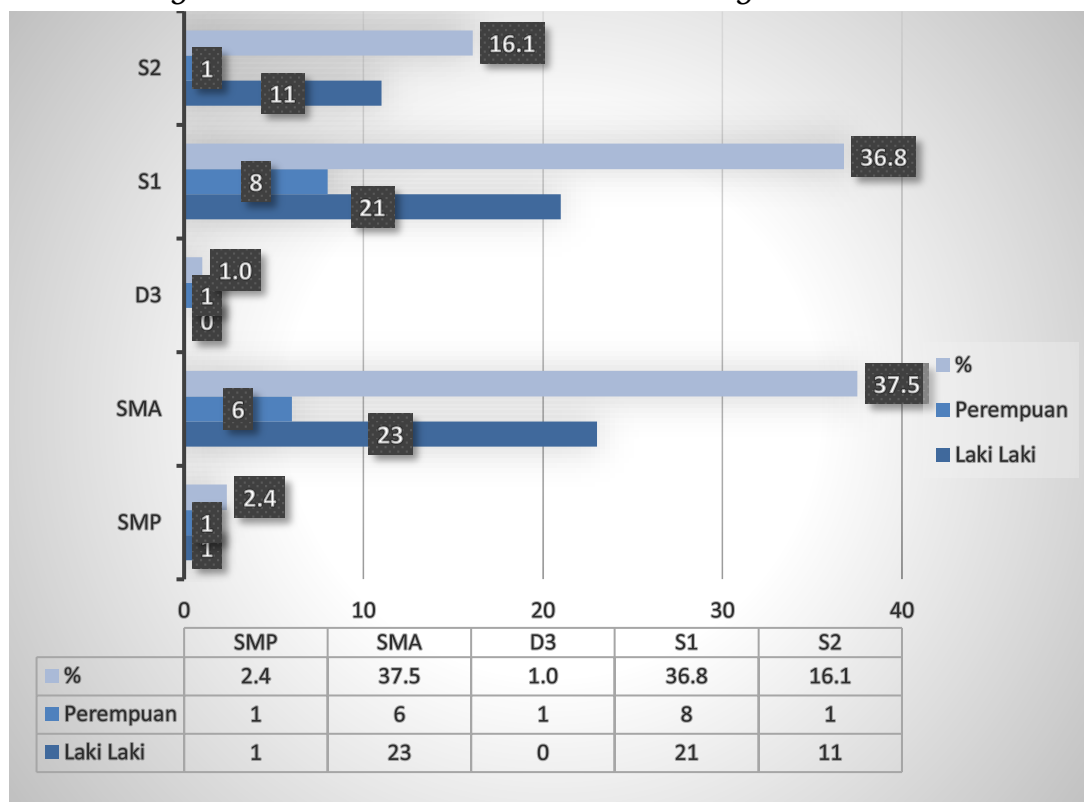
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

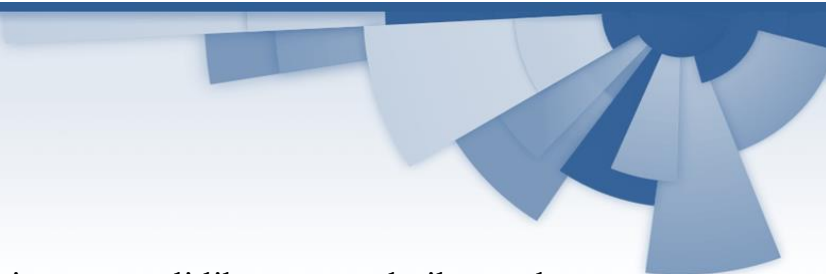
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial pada tahun 2021 didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 73 orang PNS. Dari jumlah tersebut 53 orang PNS secara langsung melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 20 orang PNS lainnya melaksanakan fungsi penunjang dibidang kesekretariatan. Pegawai Dinas Sosial jika dipilah berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 :

Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian terbesar pegawai Dinas Sosial yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat berpendidikan Pascasarjana (16.1%), Sarjana (36,8%), Diploma III (1%), SLTA (37.5%), SLTP (2,4%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan

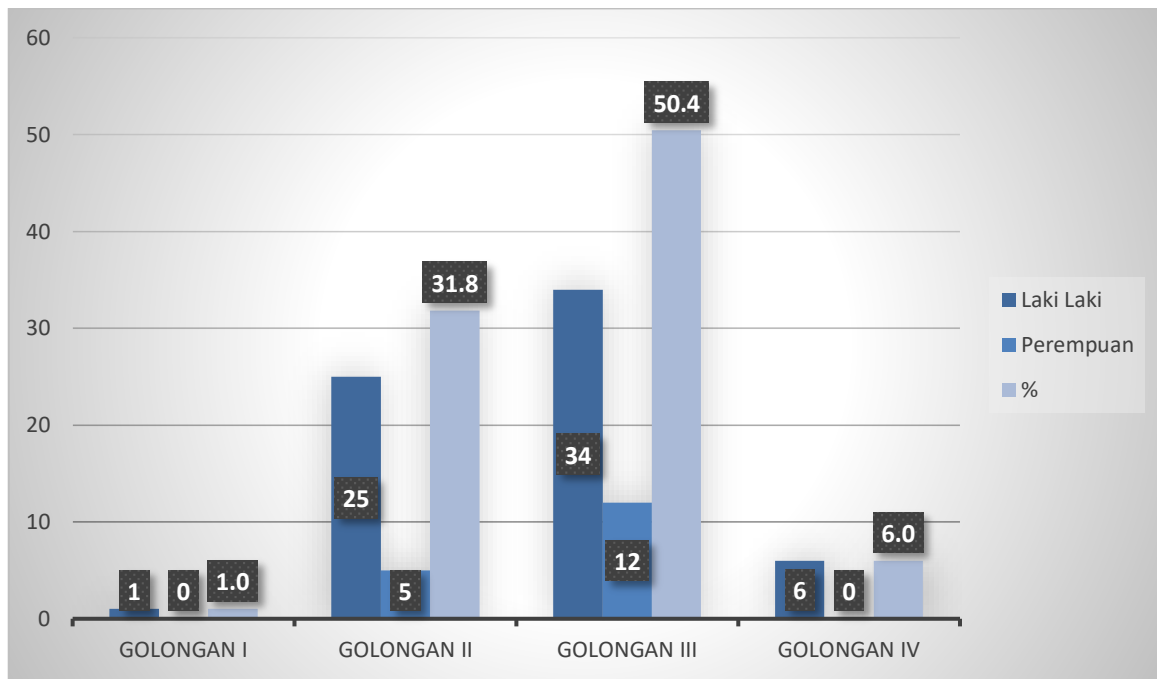


kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan intelektual seseorang. Sehingga dengan demikian pelayanan yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas yang ditekuninya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau yang dulu dikenal dengan istilah pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan bidang tugas dari profesi Pekerjaan Sosial. Profesi ini meskipun sudah berkembang cukup pesat di negara-negara Amerika, Eropa dan Skandinavia, namun di Indonesia belum banyak dikenal karena perkembangan profesi ini yang lambat. Idealnya pelaksanaan urusan wajib dibidang sosial merupakan ranah tugas profesi Pekerjaan Sosial, dengan demikian semestinya Dinas Sosial didukung oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Namun kenyataannya distribusi pegawai yang ada di Dinas Sosial hanya sedikit yang berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi *top* manajemen Dinas Sosial dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia dalam mencapai tujuan organisasi.

Dilihat dari pengelompokan berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa kelompok terbesar ada pada pegawai dengan Golongan III. Kondisi ini merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik, sehingga regenerasi manajemen dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pegawai dengan tingkat golongan I dan II tersedia dengan jumlah yang cukup memadai sebagai fungsi penunjang. Kondisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan golongan dapat diketahui secara lebih rinci pada gambar dibawah ini

*Gambar 2.2 :
Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan*



Grafik tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 46 orang pegawai (50,4%) merupakan pegawai golongan III. Mereka tersebar pada posisi struktural Eselon IV dan staf. Dalam melaksanakan tugasnya mereka ditopang oleh 30 orang (31,8%) golongan II dan I yang merupakan tenaga pelaksana. Dari gambaran mengenai komposisi pegawai berdasarkan golongan ini dapat dilihat bahwa terjadi keseimbangan komposisi bahkan dapat mempermudah dalam pengkaderan untuk jabatan struktural karena jumlah sumber daya manusia aparatur yang tersedia melebihi jumlah jabatan struktural yang ada.

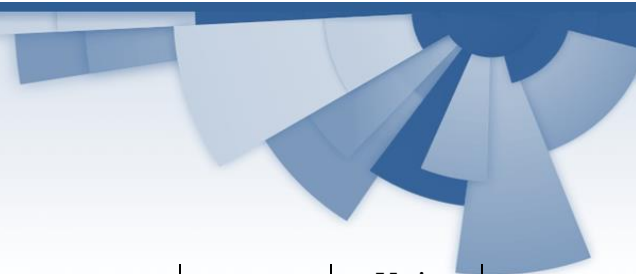
2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Secara umum sumber daya asset/modal yang dikuasai dan dipergunakan oleh Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri dari gedung dan peralatan/mesin. Sumber daya

asset/modal yang dikuasai Dinas Sosial secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Sumber daya asset Dinas Sosial

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	Kendaraan roda 4	9	Unit
2	Pick-Up	3	Unit
3	Sepeda Motor	31	Unit
4	Perkakas Bengkel	4	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	Mesin Listrik Standar / Genset	1	Unit
7	Mesin Calculator	2	Unit
8	Lemari/ Kaca/Besi/Pakaian	47	Unit
9	Rak Besi/ Metal	2	Unit
10	Filling Besi/ Metal	18	Unit
11	Brangkas	2	Unit
12	Alat penghancur kertas	1	Unit
13	White Board	1	Unit
14	Alat kantor Lainnya (lain-lain)	4	Unit
15	Tempat tidur	40	Unit
16	Meja Rapat	4	Unit
17	Kursi	212	Unit
18	Meja Kerja	64	Unit
19	Sofa	5	Unit
20	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Unit
21	Mebelair Lainnya	1	Unit
22	Mesin Potong Rumput	1	Unit
23	Lemari Es	5	Unit
24	AC Unit	10	Unit
25	Kipas Angin	19	Unit
26	Kompor gas	5	Unit
27	Alat Dapur Lainnya	21	Unit
28	Tabung gas	1	Unit
29	Televisi	2	Unit
30	Sound system	3	Unit
31	Microphone	8	Unit
32	Camera Video	1	Unit
33	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit
34	Tangga Alumunium	1	Unit
35	Dispenser	1	Unit



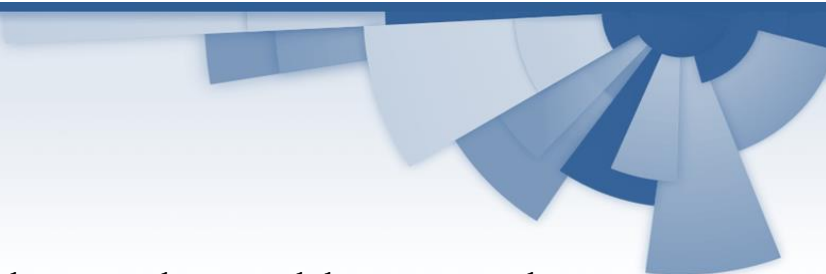
36	Alat Rumah tangga lain	36	Unit
37	Gorden	2	Unit
38	Alat Pemadam Portable	8	Unit
39	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1	Unit
40	Bola Api	6	Unit
41	CCTV	4	Unit
42	Mainframe	1	Unit
43	Internet	4	Unit
44	Personal Komputer (PC)	52	Unit
45	Peralatan Komputer	4	Unit
46	Note Book	57	Unit
47	Hard Disk	3	Unit
48	Keyboard	1	Unit
49	Printer	25	Unit
50	Monitor	2	Unit
51	Proyektor + Attachment	2	Unit
52	Telephone	1	Unit
53	Unintemuptible Power Supply (USB)	4	Unit
54	Alat Kedokteran Umum Lain-lain	1	Unit
55	Gelas Minum	1	Unit
56	Pisau Belati	2	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3.1.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Sosial

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib Sosial dan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari Urusan Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) dan Penanganan Bencana yaitu Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi



kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Selain urusan Wajib Sosial kinerja pelayanan Dinas Sosial juga tergambar dalam upaya pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

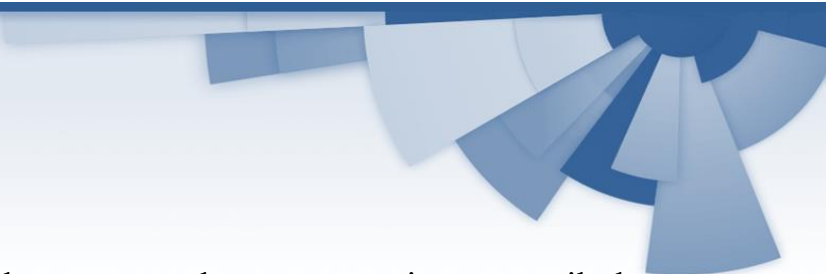
a. Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya.

Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan pelayanan terhadap Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Atau Pengemis diluar Panti. Pelayanan rehabilitasi ini dimulai dari Layanan Pengaduan dan Pendataan, Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Pemberian bimbingan fisik dan mental, pemberian bimbingan Sosial bagi keluarga, pemberian alat bantu, layanan Penelusuran Keluarga, Layanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan. Beberapa layanan tersebut dilakukan secara menyeluruh dari tahap pendataan hingga tahap pemberian rujukan. Layanan rehabilitasi sosial tersebut juga diberikan kepada PMKS lainnya kecuali Penyandang HIV AIDS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Hingga tahun 2021 kinerja Dinas Sosial pada pelaksanaan program rehabilitasi sosial mencapai hasil maksimal sesuai amanah LPPD dan SPM dimana seluruh pemerlu layanan dapat terlayani sesuai kebutuhan rehabilitasi sosial yang di tetapkan.

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana.

Perlindungan Sosial Korban Bencana dilaksanakan melalui pemberian pelayanan, bantuan sosial serta pengendalian dan pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, korban konflik, korban terdampar atau terlantar dan masyarakat yang



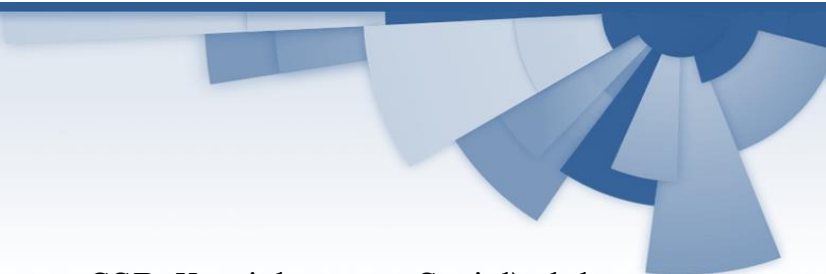
tinggal di daerah rawan dan masyarakat yang tertimpa musibah bencana.

Yang menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam hal ini adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana dan Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana dalam hal penanganan kebencanaan.

Dalam pelaksanaannya penanganan bencana yang menjadi tugas fungsi Dinas Sosial adalah mulai dari penyediaan Pangan, penyediaan Sandang, penyediaan Tempat penampungan pengungsi pada masa tanggap darurat bencana, penyediaan kebutuhan permakanan khusus bagi kelompok rentan serta pelayanan dukungan psikososial terhadap korban bencana seperti pemulihan trauma. Tercatat mulai tahun 2016 s/d tahun 2021 penanganan Bencana dapat terlaksana 100%, artinya setiap terjadi bencana alam maupun sosial yang dilaporkan kepada Dinas Sosial, pemerintah daerah hadir dan memberikan bantuan sesuai standar yang ditetapkan, sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan ini juga diperoleh melalui bantuan provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

c. Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Pemberdayaan Sosial PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecataman, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial



Berbasis Masyarakat, Forum CSR Kesejahteraan Sosial) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

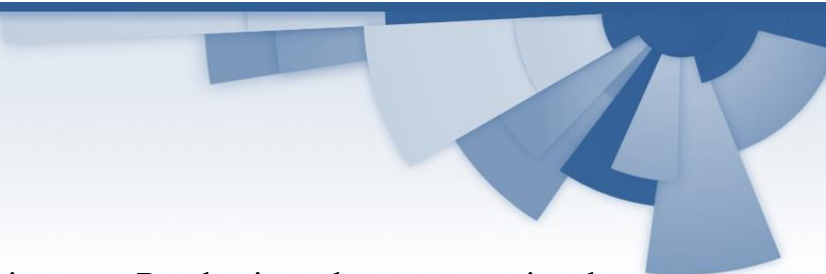
Hingga tahun 2021 sebagai PSKS Perorangan tercatat sejumlah 18 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2 Orang Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), 26 Orang Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), 25 Orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA), 97 Pendamping PKH, 1 Orang Koordinator Tekhnis Program Sembako, 17 Orang Pendamping Veteran yang telah melakukan pelayanan terhadap Masyarakat diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk PSKS Kelembagaan hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 197 Puskesmas telah terbentuk di Desa dan Kelurahan, Karang Taruna Kabupaten, 19 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 1 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan 1 Forum PSM yang telah melakukan usaha kesejahteraan sosial dan menjadi Binaan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Penanganan Fakir Miskin

Dalam Upaya Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial memiliki peran strategis sebagai penyedia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Basis data ini berisikan Keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, kecacatan, penyakit menahun, status perkawinan, kepemilikan tanda pengenal, pendidikan, dan kegiatan ekonomi anggota rumah tangga dan status kesejahteraan berdasarkan berbagai variabel meliputi keterangan rumah tangga, kepemilikan aset, akses ke fasilitas pendidikan/kesehatan/sanitasi dan lain-lainnya. Data ini dimutakhirkan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, melalui Puskesmas Kelurahan dan Desa. Data inilah yang kemudian dijadikan sebagai basis sasaran penangan Kemiskinan dilevel Pemerintah Daerah.

Upaya penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan melalui Dinas Sosial selain Penyediaan data adalah Pemberian Bantuan



Stimulan dan Pendampingan. Pemberian bantuan stimulan kepada warga miskin terdapat dua katagori yaitu katagori jaminan Sosial atau bantuan reguler pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan stimulan katagori pemberdayaan Ekonomi berupa pemberian bantuan modal usaha. Pencapaian Pelaksanaan penyaluran Bantuan Stimulan berupa jaminan sosial diwilayah Kabupaten Kutai Kartanega sangat tergantung dari Program Kementerian Sosial Republik Indonesi yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Sembako, Kedua Program ini telah mengcover sebanyak 76% Warga Miskin Kabupaten Kutai Kartanegra dengan indeks Nilai Bantuan Rata Rata 120 Miliar setiap Tahunnya. Sementara bantuan stimulan Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dilaksanakan melalui Pemberian Bantuan Modal usaha bagi KPM PKH dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Kegiatan pendampingan dilaksanakan terhadap Pelaksanaan Penyaluran PKH, BPNT dan Pendampingan pemberdayaan Ekonomi masyarakat miskin mulai dari tahap Pendataan hingga pengembangan Usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

2.3.1.2 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD pelaksana urusan wajib pengampu SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.

Jenis pelayanan dasar dan indikator SPM urusan wajib sosial yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara secara lebih rinci digambarkan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM
 Urusan Wajib Bidang Sosial Mulai Tahun 2019

		JENIS PELAYANAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		DATA		KEBUTUHAN	KOMPOEN BIAYA	RENCANA PELAKSANAAN		TARGET							
					CARA HITUNG	OUTCOME			Program	Kegiatan								
SPM BIDANG SOSIAL	1	REHABILITASI SOSIAL DASAR (Terpenuhinya Kebutuhan Dasar)	1	DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya <u>di luar panti</u> selama 1 tahun	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi dikali 100%	layanan data dan pengaduan	Honor Petugas, jumlah petugas, alat pengolah data, alat tulis dan internet	Program Penanganan Fakir Miskin	Operasional SLRT	100%							
			2	ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI			layanan kedaruratan (UPSK)	transport petugas, kendaraan khusus, pemeliharaan dan honor TRC	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan UPSK, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional								
			3	LANSIA TERLANTAR DILUAR PANTI			alat bantu, perbekalan kesehatan,	kursi roda dkk, obat2an, transport petugas		Day Care								
			4	TUNA SOSIAL (GEPENG) DILUAR PANTI								bimbingan fisik, mental, spiritual	honor peksos, TKSK, relawan, alat peraga	Facilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial anak dan Lansia				
							bimbingan sosial keluarganya		Facilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial									
	2	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Terpenuhinya Kebutuhan Dasar)	1	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dalam 1 tahun	Jumlah Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dibagi populasi x 100%		pembelian bahan permakanan, pakaian paket bantuan lainnya, trasnport petugas, penyediaan tempat penampunganpengungsi	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan masalah2 strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa								
							Penanganan Khusus kelompok rentan	paket bahan permakanan khusus (lansia, Ibu hamil, disabilitas dan anak)				Pembentukan Kampung Siaga Bencana peningkatan kapasitas TAGANA						
							pelayanan dukungan psikososial	alat bantu, honor peksos, tksk, tagana, biaya pengiriman										



PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang diterima

DISABILITAS TERLANTAR

1. Permakanan
2. Sandang
3. Asrama Yang Mudah Diakses
4. Alat Bantu
5. Perbekalan Kesehatan
6. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
7. Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
8. Pembuatan NIK
9. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
10. Pelayanan Penelusuran Keluarga dan/atau
11. Pelayanan Reunifikasi Keluarga

ANAK TERLANTAR

1. Pengasuhan
2. Permakanan
3. Sandang
4. Asrama Yang Mudah Diakses
5. Perbekalan Kesehatan
6. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
7. Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
8. Pembuatan Akte Kelahiran, NIK, dan KIA
9. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan
10. Pelayanan Penelusuran Keluarga
11. Pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau
12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti



LANSIA TERLANTAR

1. Permakanan
2. Sandang
3. Asrama Yang Mudah Diakses
4. Alat bantu
5. Perbekalan Kesehatan
6. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
7. Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
8. Pembuatan NIK
9. Akses Ke Layanan Kesehatan
10. Pelayanan Penelusuran Keluarga
11. Pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau
12. Pemulasaraan

Gelandangan Pengemis

1. Permakanan
2. Sandang
3. Asrama/COTTAGE yang mudah diakses
4. Perbekalan Kesehatan
5. Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
6. Bimbingan Keterampilan dasar
7. Pembuatan NIK,akte lahir, surat nikah dan/atau KIA
8. Akses Ke Layanan Kesehatan
9. Pemulangan ke daerah asal

KRITERIA REHSOS ANAK TERLANTAR DISABILITAS TERLANTAR LANSIA TERLANTAR

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak terawat, tidak terpelihara, dan tidak terurus
2. Masih ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus

KRITERIA REHSOS DASAR GELADANGAN DAN PENGEMIS

1. Kepala keluarga berusia 19 sd 6 tahun
2. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak terawat, tidak terpelihara, dan tidak terurus
3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap
4. Masih ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus

KRITERIA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA

1. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 -50 orang
2. Dampak bencana meliputi dari 1 kabupaten/kota
3. Surat Penetapan bencana dari Kepala daerah

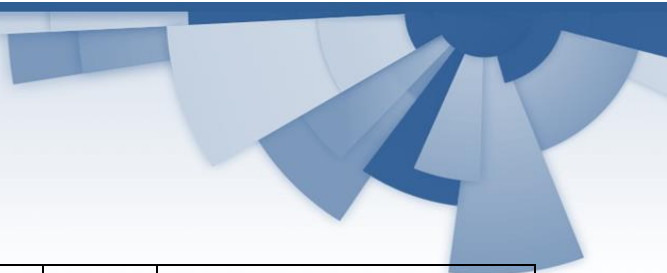
Capaian indikator SPM pada tahun 2020 secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Indikator persentase Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak TERlantar, Gelandangan dan Pengemis skala Kab/Kota yang memperoleh pemenuhan kebutuhan layanan dasar yang targetnya ditetapkan sebesar 100% sampai dengan tahun 2020, berhasil tercapai

Jenis pelayanan dasar penanggulangan korban bencana juga mencatat capaian kinerja 100% pada tahun 2020. Jenis pelayanan dasar ini tidak semata-mata menjadi tugas Dinas Sosial tetapi juga berhubungan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bencana alam dan bencana social akibat ulah manusia seperti kebakaran. Pada saat terjadinya bencana, semua korban dievakuasi dengan menggunakan peralatan evakuasi standard, mereka semua mendapatkan pelayanan atau bantuan sosial setidaknya pada masa tanggap darurat. Diluar masa tanggap darurat jika masih dibutuhkan dan dimungkinkan ketersediaan anggarannya, maka bantuan sosial untuk pemulihan masih diberikan. Dalam hal penanganan korban

bencana yang perlu lebih diperhatikan nantinya adalah tingkat kecepatan dan ketepatan waktu penanganan. Hal ini bisa dihitung dengan membandingkan waktu yang diperlukan dari mulai adanya laporan bencana, seperti misalnya kebakaran, dengan waktu pelaksanaan pertolongan. Semakin cepat waktu yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat pula capaian kinerja.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial hingga tahun 2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2020			Tahun 2021		KETERANGAN
		Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian = $\frac{(4):(3)}{100\%}$	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Target Jumlah Orang Yang Terlayani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	Jumlah warga negara penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1.117 Orang	1.117 Orang	100	1.707 Orang	1.707 Orang	Terlayani melalui program: - PKH (Kementrian Sosial RI) (303) - Rehabilitasi Sosial bagi PMKS -Pembab.(16). - Bantuan Sosial Terencana Prov. Kaltim (673). - Program ASPD Kemensos (125).
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	22.167 Anak	22.167 Anak	100	22151 Anak	22.151 Anak	Terlayani melalui Program: - PKH (22.101). - Rehabilitasi Sosial PMKS Kegiatan Pelayanan pada RPTC (37). - Panti Sosial Asuhan Anak (21). - Sakti Peksos (8).
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2.687 Orang	2.687 Orang	100	2694 Orang	2.694 Orang	Terlayani melalui program: - PKH (Kementrian Sosial RI) (2684) - Rehabilitasi Sosial bagi PMKS -Pembab.(3).



Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	36	36	100	60	60	Terlayani melalui Program - Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Day care service (10). - Rehabilitasi Sosial PMKS, kegiatan Pemulangan OT (26).
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	66.222 KK	66.222 KK	100	1.500 kk/ 4.500 jiwa	1.500 kk/ 4.500 jiwa	Terlayani melalui program: - Perlindungan dan jaminan Sosial (Tanggap Darurat Bencana) (991 kk /2339 Jiwa). - Bantuan Covid 19 (65.231 kk).

Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang.

Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Anggaran merupakan salah satu indikator input yang penting bagi sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meskipun demikian anggaran bukan segalanya yang dapat menentukan keberhasilan kinerja sebuah Perangkat Daerah. Kinerja anggaran Dinas Sosial sepanjang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

*Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
Tahun 2016 -2020*

Uraian	Anggaran pada tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA LANGSUNG					
Belanja Pegawai	10.038.461.601,05	8.498.171.418,58	7.598.646.378,80	9.282.230.952,34	8.360.961.563,32
Belanja Barang dan Jasa	9.628.135.167,15	10.632.212.685,34	10.429.465.313,00	8.826.168.640,00	11.808.017.693,76
Belanja Modal	566.013.325,00	335.225.850,00	26.852.125,00	2.342.511.760,00	562.473.600,00
Jumlah Total	20.232.610.093,20	19.465.609.953,92	18.054.963.825,80	20.450.911.352,34	20.731.452.857,32

Uraian	Realisasi anggaran pada tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA LANGSUNG					
Belanja Pegawai	8.537.973.399,00	7.315.240.236,00	7.246.410.902,00	8.791.417.776,00	7.913.927.757,00
Belanja Barang dan Jasa	6.975.682.245,00	7.504.931.673,00	8.690.554.608,00	6.830.450.004,00	8.893.850.439,00
Belanja Modal	485.467.525,00	333.343.650,00	26.012.125,00	2.061.896.239,00	537.406.550,00
Jumlah Total	15.999.123.169,00	15.153.515.559,00	15.962.997.635,00	17.879.856.1699,00	17.345.184.746,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Diera teknologi informasi dan keterbukaan informasi publik data yang akurat menjadi keniscayaan dalam proses pelayanan dan penanganan masalah Sosial. Saat ini seluruh bantuan dan layanan yang diarahkan bagi warga Negara yang membutuhkan harus terintegrasi dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Basis Data terpadu merupakan sumber dasar utama pelayanan dan bantuan terhadap masyarakat sehingga akurasi dan pemetaan yang baik sangat dibutuhkan demi tepatnya sasaran dan optimalisasi kinerja.

Tantangan besar yang dihadapi Dinas Sosial untuk menyajikan Basis Data terpadu yang berkualitas terkendala Luas wilayah, Jumlah Warga terdata dan Sumber Daya Manusia pengelola data di tingkat Desa dan Kelurahan.

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial. Program ini memerlukan dukungan validitas Data Kemiskinan yang memadai. Melalui kegiatan pemutakhiran Basis Data Terpadu yang mulai dilaksanakan mulai tahun 2020, diharapkan Pemerintah Kabupaten memiliki basis data yang akurat dan terpetakan dengan baik karater kemiskinan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga intervensi program penanganannya dapat berjalan secara optimal.



Dengan demikian tentunya dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal pemenuhan anggaran dan fasilitas penunjang lainnya sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai target target yang diharapkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilakukan melalui identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Cakupan PMKS Penerima Bantuan Sosial Perlindungan dan Jamainan Sosial belum menyeluruh	Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PMKS sangat tergantung dari Porgram Kementrian Sosial
		Pendampingan Terkendala Luas wilayah dan Jumlah Pendamping
		Penjangkauan anak terlantar terkendala wewenang pengelolaan panti
		Kebutuhan Alat bantu aksesibilitas belum terpenuhi secara menyeluruh
		Kebijakan Terkait SPM yang belum mengakomodir PMKS secara Keseluruhan
Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Baseline Penanganan Kemiskinan	Belum Optimalnya Fungsi DTKS dalam Penanganan Kemiskinan	DTKS Belum tervalidasi secara menyeluruh
		DTKS belum terpetakan secara detail sebagai sumber data penanganan kemiskinan
		Lemahnya fungsi koordinasi antar stakeholder dalam penggunaan DTKS sebagai sumber data
		SDM pengelola data (Puskesos) di level Desa/ Kelurahan sering diganti.

		Musyawarah Data di level Desa/ Kelurahan belum berjalan dengan baik
		Belum semua Desa/ Kelurahan melakukan Update DTKS secara Periodik
Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi PMKS	Belum Optimalnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum tersedia layanan Kedaruratan yang memadai
		Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Pekerja Sosial Profesional
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Dalam Proses Rehsos sangat Luas.(SPM)
Optimalisasi Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	PSKS Perorangan dan Kelembagaan Belum berfungsi optimal	Penerima layanan dan Pengelolaan PSKS kelembagaan Belum terdata dengan baik
		Sarana dan prasarana Lembaga PSKS belum memadai
		Sumber pendanaan PSKS kelembagaan masih tergantung pada donatur
		Kurangnya kemampuan manajerial PSKS kelembagaan
		Kurangnya dukungan operasional bagi PSKS Perorangan
Optimalisasi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Belum Optimalnya Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP	Kapasitas dan Kuantitas SDM Tagana masih terbatas
		Pembentukan Kampung Siaga Bencana membutuhkan biaya yang relatif besar
		Beberapa bagian TMP perlu direhabilitasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS.
2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Baseline Penanganan Kemiskinan.
3. Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi PMKS.
4. Optimalisasi Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial
5. Optimalisasi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisa terhadap permasalahan dan faktor-faktor yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut. Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi: Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya			

	Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belum Optimalnya Fungsi DTKS dalam Penanganan Kemiskinan	DTKS Belum tervalidasi secara menyeluruh, DTKS belum terpetakan secara detail sebagai sumber data penanganan kemiskinan	Penggunaan SIKS Android dalam proses pemutakhiran data sudah mulai diterapkan.
		Cakupan PMKS Penerima Bantuan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial belum menyeluruh	Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap PMKS sangat tergantung dari Program Kementerian Sosial	Program dedikasi kepala daerah terpilih yang mengakomodir jaminan sosial bagi warga yang kurang beruntung.
	Program : Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum Optimalnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Belum tersedia layanan Kedaruratan yang memadai Belum terpenuhinya kebutuhan SDM Pekerja Sosial Profesional Kuota Panti rujukan milik Provinsi terbatas	Upaya dilakukan melalui rehabilitasi berbasis masyarakat
	Program: Penanganan Bencana	Belum Optimalnya Penanganan Bencana	Kapasitas dan Kuantitas SDM Tagana masih terbatas Pembentukan Kampung Siaga Bencana membutuhkan biaya yang relatif besar	Pemberdayaan TJSP dalam penanganan kebencanaan wilayah.
	Program: Pemberdayaan Sosial	PSKS Perorangan dan Kelembagaan Belum berfungsi optimal	Penerima layanan dan Pengelolaan PSKS kelembagaan Belum terdata dengan baik Kurangnya dukungan operasional bagi PSKS Perorangan Kurangnya kemampuan manajerial PSKS kelembagaan Sumber pendanaan PSKS kelembagaan	Adanya pendamping program yang diluncurkan kementerian Sosial RI



		masih tergantung pada donatur	
Program: Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pegelolaan TMP perlu dioptimalkan	Beberapa bagian TMP perlu direhabilitasi	Program pengelolaan TMP diampu oleh bidang teknis sehingga bisa lebih fokus dalam pengelolaanya

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu dilakukan beberapa penajaman terhadap indikator kinerja (outcome) dan program yang disajikan. Penajaman indikator kinerja outcome akan disajikan lebih rinci pada bab 5.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi Kementerian Sosial Tahun
2020-2024

No	Permasalahan	Akar permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat	1. Rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan 2. Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum 3. Keterbatasan akses pelayanan Kesehatan 4. Keterbatasan akses pelayanan Pendidikan	1. Angka stunting pada balita Indonesia masih tinggi 2. Rendahnya kesadaran pentingnya dokumen kependudukan. 3. potensi penyakit menular dan tidak menular pada masyarakat miskin 4. Angka partisipasi Pendidikan masih rendah	1. Perluasan Program Sembako 2. OPTimalisasi Pengelolaan DTKS berbasis NIK. 3. OPTimalisasi peran dan fungsi pendampingan 4. Integrasi program antar Kementerian
2	Memastikan kesempatan yang sama bagi penduduk miskin dan rentan dalam peningkatan sosial ekonomi	1. Keterbatasan sumber daya finansial 2. Keterbatasan kemampuan SDM pengelola 3. Keterbatasan sumber pemasaran produk.	Pola Pikir kelompok miskin dan rentan yang cenderung work n get paid. Pemberian kredit usaha belum teridentifikasi secara baik Masih parsialnya proses pemasaran dari usaha skala mikro	Penguatan identifikasi potensi dan komoditas menurut wilayah bisa digalakan. Metode yang lebih mudah dalam pengembangan balai Latihan kerja Penguatan kelompok dan jaringan dengan usaha skala besar
3	Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi risiko serta perlindungan sosial.	Penanganan resiko sosial yang belum responsif Keterbatasan pendampingan pelayanan Keterbatasan pendampingan pelayanan	Risiko Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, keuangan, penelantaran dan diskriminasi Penguatan skema perlindungan sosial masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan	Pengembangan skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi darurat. Penguatan kerangka kelembagaan integrative

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi sebagai berikut :

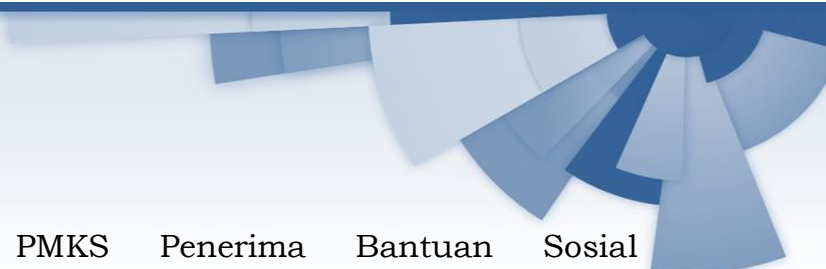
Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Peningkatan dan Perluasan Jangkauan penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan	a. Ketersediaan data PMKS dan PSKS b. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penanganan PMKS c. Perturan daerah ttg pembangunan Kesos	a. Tingginya migrasi PMKS b. Anggaran yang proporsional c. Penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan sentuhan kebutuhan profesionalis me pekerjaan sosial. d. Peran aktif Lembaga penyelenggara an kesos	Pelayanan kesejahteraan sosial (pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, jaminan social dan penanganan fakir miskin) tidak sesuai target
Kajian Renstra SKPD Kab/Kota	Peningkatan perluasan jangkauan penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan	a. Komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penanganan PMKS b. Kewenangan kelembagaan yang menangani PMKS dan PSKS c. Sinergitas perencanaan dengan stakeholders d. Ketersediaan data PMKS dan PSKS	a. Tingginya migrasi PMKS b. Bentuk kelembagaan Dinas Kesos yang belum sama c. Ketersediaan anggaran yang belum proporsional	Belum optimalnya sinergitas dan sinkronisasi dalam penanganan PMKS antara provinsi dan kab/kota
Kajian Renstra K/L	Peningkatan perluasan jangkauan penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan	Kebijakan Otonomi daerah Komitmen pemerintah daerah	-Perubahan sosial yang terjadi seara cepat -Prioritas anggaran	Tidak tercapainya target capaian penanganan PMKS

				pembangunan nasional yang belum berpihak pada pembangunan kesejahteraan PMKS	
Kajian RTRW	-Perluasan jangkauan pelayanan sosial lanjut usia terlanter di kab. Bulungan yang menjangkau lansia diwilayan Kaltara -Peningkatan fungsi panti2 yang ada di Samarinda sebagai panti tingkat provinsi yang menjadi rujukan Kabupaten Kota -Penetapan Kampung Siaga Bencana (KSB) Pembangunan panti social terpadu	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan sosial	-Kewenangan kelembagaan yang menangani PMKS -Komitmen pimpinan daerah dan SKPD	Penempatan aparatur Anggaran yang proporsional	Pelayanan belum optimal
Kajian KLHS	-Pembangunan pemukiman KAT yang berada pada Kawasan bukan hutan lindung atau resapan air -Partisipasi perusahaan melalui CSR	-Jumlah PMKS KAT yang dimukimkan -Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan social melalui CSR	-Kewenangan kelembagaan yang menangani PMKS -Ketersediaan data KAT -Regulasi tentang CSR	Komitmen kepala daerah Anggaran yang proporsional Komitmen perusahaan	Pelayanan belum optimal

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan ini merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa isu strategis tersebut meliputi :

- 
1. Perluasan Cakupan PMKS Penerima Bantuan Sosial Perlindungan dan Jamainan Sosial.
 2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Baseline Penanganan Kemiskinan.
 3. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.
 4. Peningkatan PSKS Perorangan dan Kelembagaan.
 5. Peningkatan Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran atau mengacu pada Visi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dan tidak mengalami perubahan. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Sosial berkenaan dengan tugas dan wewenangnya. Dengan mempertimbangkan pada kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan ke depan, Visi yang dicapai pada tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

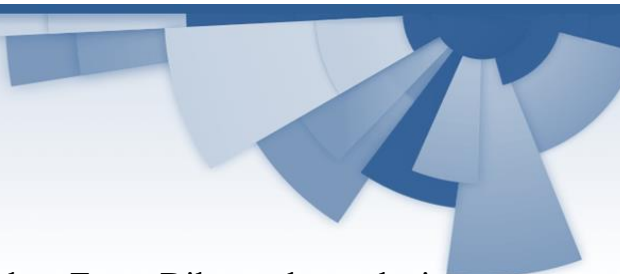
Visi tersebut mengandung 2 kata kunci yang dapat dimaknai sebagai berikut:

a. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

b. MASYARAKAT YANG BERBAHAGIA

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan



ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

4.1.2 Misi

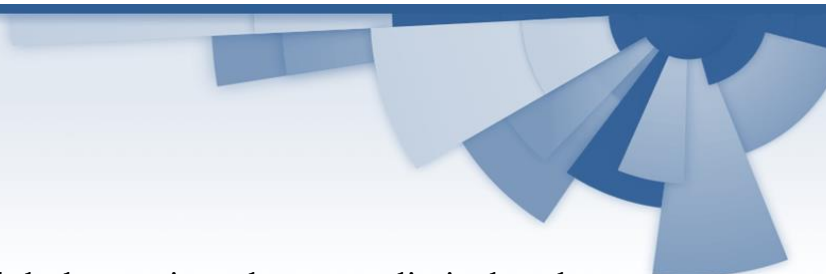
Misi adalah rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Rumusan misi yang baik dapat memudahkan untuk menggambarkan visi dan upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi merupakan hal penting yang dapat memberikan arahan kerangka bagi perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Mengacu pada Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka Misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

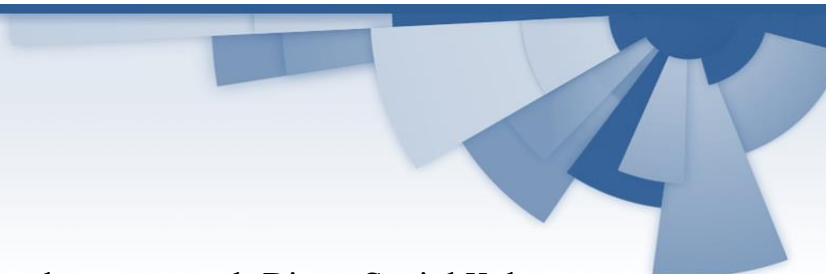
Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam



merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
 - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
 - d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
 - e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
 - f) *continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap



Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten
Kutai Kartanegara
Tahun 2022 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar		Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	93	94	94	96	97	98	99	99
		Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	93	94	94	96	97	98	99	99
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	74.76	76	78	79	81	82	84	84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali

indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (2022-2026)

VISI (RPJMD)		: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"							
MISI (RPJMD)*		: "Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani"							
Tujuan	Sasaran	Strategy	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Melaksanakan Manajemen Berbasis Kinerja ke Seluruh ASN Dinas Sosial Secara Konsisten	1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum 2. Peningkatan pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD 3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur 4. Penerapan arsip baku pada Dinas Sosial 5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan Dinas Sosial 6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial secara Menyeluruh	1. Pendampingan Program Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI 2. Penjangkauan Anak Terlantar berbasis Keluarga. 3. Fasilitasi pengembangan Ekonomi Masyarakat 4. Fasilitasi Bantuan Sosial masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	
		Optimisasi Pengelolaan DTKS	1. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pengelola Data (Puskessos) 2. Penguatan Proses Musyawarah Data di Desa/Kelurahan 3. Fasilitasi Update data secara periodik	✓	✓	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS	Pelayanan Rehabilitasi Sosial secara menyeluruh	1. Penyediaan Layanan kedaruratan sesuai standar. 2. Pemenuhan Kebutuhan SDM Pekerja Sosial Profesional. 3. Perluasan cakupan pemenuhan kebutuhan Pelayanan dasar rehabilitasi sosial 4. Pemenuhan Kebutuhan dasar pada pelaksanaan SPM bidang Sosial	✓	✓	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Peran dan Fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Optimalisasi Fungsi PSKS Perorangan dan Kelembagaan	1. Pendataan Layanan dan Pengelolaan PSKS Kelembagaan 2. Bantuan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PSKS 3. Fasilitasi Koordinasi dengan sumber pendanaan yang dimungkinkan. 4. Peningkatan kemampuan manajerial PSKS Kelembagaan 5. Peningkatan dukungan Operasional bagi PSKS Perorangan	✓	✓	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Optimalisasi Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP	1. Peningkatan kapasitas dan Penambahan Tagana 2. Pembentukan Kampung Saga Bencana melalui Pembiayaan non APBD 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan TMP	✓	✓	✓	✓	✓	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahunan. Penetapan indikator ini mengacu pada penetapan indikator kinerja Sasaran RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (*outcome*) sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (*output*). Indikator *outcome* bisa diperoleh jika indikator *output* dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator *output* merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif tahun 2021-2026 ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini:

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Peiode Renstra						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94%	94%	23,750,520,794	96%	23,837,076,495	97%	23,762,076,495	98%	23,762,076,495	99%	23,762,076,495	99%	118,873,826,774	Kepala Dinas	Kab.Kukar			
	Meningkatkan Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah Dinas Sosial					Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	74.76	78	10,811,920,794	79	11,008,476,495	81	11,008,476,495	82	11,008,476,495	84	11,008,476,495	84	54,845,826,774	Kepala Dinas	Tgr	
		1	6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	74.76	78	10,811,920,794	79	11,008,476,495	81	11,008,476,495	82	11,008,476,495	84	11,008,476,495	84	54,845,826,774	Sekretaris	Tgr
			1	6	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penegendalian	Dokumen	30	8	100,000,000	8	175,000,000	8	175,000,000	8	175,000,000	8	800,000,000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	Tgr
			1	6	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	3	60,000,000	3	75,000,000	3	75,000,000	3	75,000,000	15	360,000,000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	Tgr
			1	6	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	4	40,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	20	440,000,000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	Tgr
			1	6	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	20	20	9,542,748,582	20	9,332,385,997	20	9,332,385,997	20	9,332,385,997	100	46,872,292,570	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	Tgr
			1	6	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan	Orang Bulan	936	936	9,422,088,582	936	9,192,385,997	936	9,192,385,997	936	9,192,385,997	936	46,191,632,570	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	Tgr
			1	6	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	20	20	120,660,000	20	140,000,000	20	140,000,000	20	140,000,000	100	680,660,000	Subag Penyusunan Program dan Keuangan	Tgr
			1	6	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	52,800,000	3	52,800,000	3	52,800,000	3	52,800,000	15	264,000,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	52,800,000	3	52,800,000	3	52,800,000	3	52,800,000	15	264,000,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	16	160,000,000	Subag Kepegawaian	Tgr
			1	6	1	2.1	10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	Orang	15	0	40,000,000	15	40,000,000	15	40,000,000	15	40,000,000	75	160,000,000	Subag Kepegawaian	Tgr
			1	6	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	9	7	202,248,800	7	264,341,800	7	264,341,800	7	264,341,800	35	1,259,616,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	50	50	5,110,200	50	5,110,200	50	5,110,200	50	5,110,200	250	25,551,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	20	20	59,247,000	20	59,247,000	20	59,247,000	20	59,247,000	100	296,235,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	20	20	20,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000	20	40,000,000	100	180,000,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	5	5	19,986,600	5	19,986,600	5	19,986,600	5	19,986,600	25	99,933,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan /Material yang disediakan	Jenis	20	20	29,998,000	20	29,998,000	20	29,998,000	20	29,998,000	100	149,990,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	OH	300	300	49,957,000	300	60,000,000	300	60,000,000	300	60,000,000	1500	289,957,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	10	Penausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsidan /UKK	Berkas	12	12	17,950,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	60	137,950,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan	Jenis	4	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	20	80,000,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan	Persen	100	100	19,536,714	100	42,950,000	100	42,950,000	100	42,950,000	100	191,336,714	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	86	10	19,536,714	10	42,950,000	10	42,950,000	10	42,950,000	50	191,336,714	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	767,586,698	12	767,586,698	12	767,586,698	12	767,586,698	12	3,837,933,490	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
			1	6	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Bulan	12	12	2,299,000	12	2,299,000	12	2,299,000	12	2,299,000	12	11,495,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr

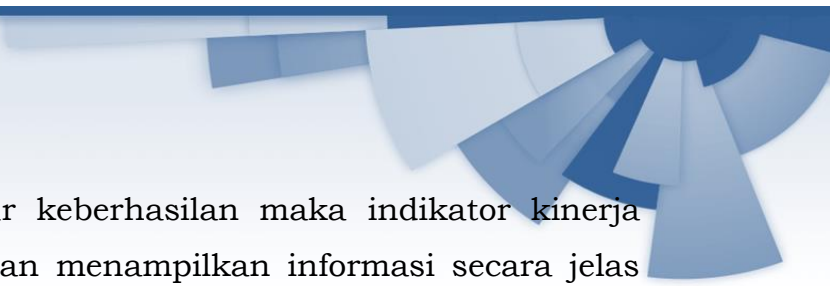
		1	6	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	193,239,174	12	193,239,174	12	193,239,174	12	193,239,174	12	193,239,174	12	966,195,870	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
		1	6	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung non PNS	Bulan	12	12	572,048,524	12	572,048,524	12	572,048,524	12	572,048,524	12	572,048,524	12	2,860,242,620	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
		1	6	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	127,000,000	100	333,412,000	100	333,412,000	100	333,412,000	100	333,412,000	500	1,460,648,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
		1	6	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	54	49	70,000,000	49	90,180,000	49	90,180,000	49	90,180,000	49	90,180,000	245	430,720,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
		1	6	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	5	5	25,000,000	5	34,010,000	5	34,010,000	5	34,010,000	5	34,010,000	25	161,040,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
		1	6	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	24	12	32,000,000	12	34,222,000	12	34,222,000	12	34,222,000	12	34,222,000	60	168,888,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
		1	6	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	12	12	-	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	400,000,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
		1	6	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	16	16	-	16	75,000,000	16	75,000,000	16	75,000,000	16	75,000,000	80	300,000,000	Subag Umum dan Ketataksanaan	Tgr
	Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial							Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	93.5	94.33	12,938,600,000	95.5	12,828,600,000	96.67	12,753,600,000	97.83	12,753,600,000	99	12,753,600,000	99	64,028,000,000	Kepala Dinas	Kab.Kukar
		1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang diberdayakan	Persen	84	86	925,000,000	88	775,000,000	90	700,000,000	92	700,000,000	94	700,000,000	94	3,800,000,000	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	Komunitas	6	6	75,000,000	6	75,000,000	6	0	0	0	0	0	0	150,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan	Komunitas	6	6	75,000,000	6	75,000,000	6	0	6	0	6	0	6	150,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	Orang	50	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	250	375,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang	Orang	50	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	250	375,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	Orang	70	70	775,000,000	70	625,000,000	70	625,000,000	70	625,000,000	70	625,000,000	350	3,275,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan Kemampuannya	Orang	50	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	250	625,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang ditingkatkan Kemampuannya	Orang	20	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	100	1,000,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang ditingkatkan Kemampuannya	Lembaga	20	20	400,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	100	1,400,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	2	2	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan Kemampuannya	Lembaga	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Persen	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	250,000,000	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	3	2		Pemulangan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Orang	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	250,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	3	2	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke daerah asalnya	Orang	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	250,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persen	100	100	1,765,000,000	100	1,810,000,000	100	1,810,000,000	100	1,810,000,000	100	1,810,000,000	100	9,005,000,000	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Orang	200	200	1,075,000,000	200	1,200,000,000	200	1,200,000,000	200	1,200,000,000	200	1,200,000,000	1000	5,875,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	1	Penyediaan Permakanan dalam proses rehabilitasi	Jumlah Penerima Bantuan Permakanan dalam proses rehabilitasi	Orang	200	200	400,000,000	200	500,000,000	200	500,000,000	200	500,000,000	200	500,000,000	1000	2,400,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan Sandang dalam proses rehabilitasi	Orang	200	200	150,000,000	200	150,000,000	200	150,000,000	200	150,000,000	200	150,000,000	1000	750,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu dalam proses rehabilitasi	Orang	100	50	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	450	1,000,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima layanan Reunifikasi Keluarga dalam proses rehabilitasi	Orang	50	50	125,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	250	725,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar

		1	6	4	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima bimbingan Sosial dalam proses rehabilitasi	Orang	50	50	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	450	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan Rujukan dalam proses rehabilitasi	Orang	500	500	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	4500	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh Jayanan Rehabilitasi Sosial	Orang	50	50	690,000,000	50	610,000,000	50	610,000,000	50	610,000,000	50	610,000,000	250	3,130,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan Kedaruratan dalam proses rehabilitasi	Orang	50	25	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	225	375,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Bantuan Permakanan dalam proses rehabilitasi	Orang	50	100	200,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	500	680,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan Sandang dalam proses rehabilitasi	Orang	50	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	250	400,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu dalam proses rehabilitasi	Orang	50	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	150	300,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima bimbingan Sosial dalam proses rehabilitasi	Orang	20	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	250	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penerima layanan Reunifikasi Keluarga dalam proses rehabilitasi	Orang	50	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	200	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	4	2	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dalam proses rehabilitasi	Dokumen	4	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	10	375,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	9,373,600,000	85	9,268,600,000	90	9,268,600,000	95	9,268,600,000	100	9,268,600,000	100	46,448,000,000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5			Cakupan Layanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin non Potensial	Persen	N.a	100	100		100		100		100		100		100		100	100
		1	6	5	2		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	Anak	25	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	125	1,500,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5	2	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau	Anak	25	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	125	1,500,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir miskin yang dikelola	Dokumen	2	2	9,073,600,000	2	8,968,600,000	2	8,968,600,000	2	8,968,600,000	2	8,968,600,000	10	44,948,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Fakir Miskin	Dokumen	2	2	250,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	2	400,000,000	10	1,850,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5	2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Puskesos Rekonsiliasi Pemutakhiran DTKS	Orang	474	474	420,000,000	474	500,000,000	474	500,000,000	474	500,000,000	474	500,000,000	2370	2,420,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	0	2639	7,943,600,000	3000	7,843,600,000	3000	7,843,600,000	3000	7,843,600,000	3000	7,843,600,000	3000	39,318,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	5	2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang menerima Fasilitas Pengembangan ekonomi	Orang	0	50	460,000,000	50	225,000,000	50	225,000,000	50	225,000,000	50	225,000,000	250	1,360,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab.Kukar
		1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana yang tertangani	Persen	100	100	625,000,000	100	725,000,000	100	725,000,000	100	725,000,000	100	725,000,000	100	3,525,000,000	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP	Kab.Kukar
		1	6	6	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial penerima perlindungan Sosial	Keluarga	1500	1500	425,000,000	1,500	525,000,000	1,500	525,000,000	1,500	525,000,000	1,500	525,000,000	7500	2,525,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	6	2	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penerima Bantuan Permakanan dalam masa tanggap darurat bencana	Keluarga	1500	1000	300,000,000	1500	300,000,000	1500	300,000,000	1500	300,000,000	1500	300,000,000	7000	1,500,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	6	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Bantuan Sandang dalam masa tanggap darurat bencana	Keluarga	1500	1000	125,000,000	1500	125,000,000	1500	125,000,000	1500	125,000,000	1500	125,000,000	7000	625,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	6	2	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	Keluarga	0	0	-	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	400	200,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	6	2	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penerima Bantuan Dukungan Psikososial pasca masa tanggap darurat bencana	Keluarga	0	0	-	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	50	50,000,000	200	200,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	6	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	Desa/ Kelurahan	4	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	6	2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Desa/kelurahan peserta sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Desa/ Kelurahan	4	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	6	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	Orang	25	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	25	500,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab.Kukar
		1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang di kelola	Persen	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	1,000,000,000	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP	Kab.Kukar
		1	6	7	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Lokasi	4	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	20	1,000,000,000	Seksi Pengelolaan TMP	Kab.Kukar
		1	6	7	2	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang direhabilitasi	Lokasi	4	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	500,000,000	Seksi Pengelolaan TMP	Kab.Kukar
		1	6	7	2	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah TMP yang dipelihara	Lokasi	4	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	500,000,000	Seksi Pengelolaan TMP	Kab.Kukar
							TOTAL					23.750.520.794		23.837.076.495		23.762.076.495		23.762.076.495		23.762.076.495		118.873.826.774		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Pemangku Daerah Pemangku Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1 6 1 2 1 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Unit	54	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	86	10	19,536,714	10	42,950,000	10	42,950,000	10	42,950,000	10	42,950,000	50	191,336,714	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	16	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	767,586,698	12	767,586,698	12	767,586,698	12	767,586,698	12	767,586,698	12	3,837,933,490	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Bulan	12	12	2,299,000	12	2,299,000	12	2,299,000	12	2,299,000	12	2,299,000	12	11,495,000	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	193,239,174	12	193,239,174	12	193,239,174	12	193,239,174	12	193,239,174	12	966,195,870	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung non PNS	Bulan	12	12	572,048,534	12	572,048,534	12	572,048,534	12	572,048,534	12	572,048,534	12	2,860,242,620	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	127,000,000	100	158,412,000	100	158,412,000	100	158,412,000	100	158,412,000	500	760,648,000	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	54	49	70,000,000	49	90,180,000	49	90,180,000	49	90,180,000	49	90,180,000	245	430,720,000	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	5	5	25,000,000	5	34,010,000	5	34,010,000	5	34,010,000	5	34,010,000	25	161,040,000	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	24	12	32,000,000	12	34,222,000	12	34,222,000	12	34,222,000	12	34,222,000	60	168,888,000	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi	Unit	16	12	-	12	0	12	0	12	0	12	0	60	0	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
		1 6 1 2 1 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi	Unit	16	12	-	12	0	12	0	12	0	12	0	60	0	Subg. Umum dan Ketersediaan	Tgr
Meningkatkan Penanganan dan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				Persentase PMKS yang terintegrasi Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhannya	Persen	93.5	94.33	12,938,600,000	95.5	13,013,600,000	96.67	13,013,600,000	97.83	13,013,600,000	99	13,013,600,000	99	64,993,000,000	Kemendiknas	Kab. Kutai
		1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan dalam usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	84	86	925,000,000	88	775,000,000	90	700,000,000	92	700,000,000	94	700,000,000	94	3,800,000,000	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	Lembaga	6	6	75,000,000	6	75,000,000	6	0	0	0	0	0	0	150,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2 1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan	Komunitas	6	6	75,000,000	6	75,000,000	6	0	6	0	6	0	6	150,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi	Orang	50	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	250	375,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pengumpulan Uang dan Barang	Orang	50	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	250	375,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	Orang	70	70	775,000,000	70	625,000,000	70	625,000,000	70	625,000,000	70	625,000,000	350	3,275,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya	Orang	50	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	50	125,000,000	250	625,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah TCS yang ditingkatkan kemampuannya	Orang	20	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	20	200,000,000	100	1,000,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang ditingkatkan kemampuannya	Lembaga	20	20	400,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	100	1,400,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 2 2 4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK)	Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kemampuannya	Lembaga	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	250,000,000	Bidang Pemberdayaan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Persen	100	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	250,000,000	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 3 2	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Orang	5	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	250,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 3 2 1	Pemulangan dari warga negara migran korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya	Orang	0	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	50	250,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pengembang kemampuan terlarut, anak terlarut, lanjut usia terlarut dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya	Persen	100	100	1,765,000,000	100	1,990,000,000	100	1,990,000,000	100	1,990,000,000	100	1,990,000,000	100	9,725,000,000	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Orang	200	200	1,075,000,000	200	1,300,000,000	200	1,300,000,000	200	1,300,000,000	200	1,300,000,000	1000	6,275,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Uraian Kinerja Program/Kegiatan Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir Periode Renstra	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1 6 4 2 1	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penema Bantuan Pemakanan dalam proses rehabilitasi	Orang	200	200	400,000,000	200	600,000,000	200	600,000,000	200	600,000,000	200	600,000,000	1000	2,800,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penema Bantuan Sandang dalam proses rehabilitasi	Orang	200	200	150,000,000	200	150,000,000	200	150,000,000	200	150,000,000	200	150,000,000	1000	750,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penema Alat Bantu dalam proses rehabilitasi	Orang	100	50	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	450	1,000,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penema layanan Reunifikasi keluarga dalam proses rehabilitasi	Orang	50	50	125,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	50	150,000,000	250	725,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penema bimbingan Sosial dalam proses rehabilitasi	Orang	50	50	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	450	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penema layanan rujukan dalam proses rehabilitasi	Orang	500	500	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	1000	100,000,000	4500	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial	Orang	50	50	690,000,000	50	690,000,000	50	690,000,000	50	690,000,000	50	690,000,000	250	3,450,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penema layanan kedaruratan dalam proses rehabilitasi	Orang	50	25	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,000,000	225	375,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 3	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penema Bantuan Pemakanan dalam proses rehabilitasi	Orang	50	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	500	1,000,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penema Bantuan Sandang dalam proses rehabilitasi	Orang	50	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	250	400,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penema Alat Bantu dalam proses rehabilitasi	Orang	50	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	150	300,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penema bimbingan Sosial dalam proses rehabilitasi	Orang	20	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	50	100,000,000	250	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penema layanan Reunifikasi keluarga dalam proses rehabilitasi	Orang	50	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	40	100,000,000	200	500,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 4 2 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar lembaga dalam proses rehabilitasi	Dokumen	4	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	10	375,000,000	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	9,373,600,000	85	9,373,600,000	90	9,373,600,000	95	9,373,600,000	100	9,373,600,000	100	46,868,000,000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5 2	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	Anak	25	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	125	1,500,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5 2 1	Penjagaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau	Anak	25	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	25	300,000,000	125	1,500,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir miskin yang dikelola	Dokumen	2	2	9,073,600,000	2	9,073,600,000	2	9,073,600,000	2	9,073,600,000	2	9,073,600,000	10	45,368,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5 2 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Fakir Miskin	Dokumen	2	2	250,000,000	2	380,000,000	2	380,000,000	2	380,000,000	2	380,000,000	10	1,770,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5 2 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Poskesejahtera: Rekamata Pemantauan DTKS	Orang	474	474	420,000,000	474	500,000,000	474	500,000,000	474	500,000,000	474	500,000,000	2370	2,420,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5 2 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	0	2639	7,943,600,000	2639	7,943,600,000	2639	7,943,600,000	2639	7,943,600,000	2639	7,943,600,000	13195	39,718,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 5 2 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah PMKS yang menerima Fasilitas Pengembangan ekonomi	Orang	0	50	460,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	50	250,000,000	250	1,460,000,000	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Kutai
		1 6 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	625,000,000	100	3,125,000,000	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP	Kab. Kutai
		1 6 6 2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial penerima perlindungan Sosial	Keluarga	1500	1500	425,000,000	1,500	425,000,000	1,500	425,000,000	1,500	425,000,000	1,500	425,000,000	7500	2,125,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 6 2 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Penema Bantuan Pemakanan dalam masa tanggap darurat bencana	Keluarga	1500	1000	300,000,000	1500	300,000,000	1500	300,000,000	1500	300,000,000	1500	300,000,000	7000	1,500,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 6 2 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penema Bantuan Sandang dalam masa tanggap darurat bencana	Keluarga	1500	1000	125,000,000	1500	125,000,000	1500	125,000,000	1500	125,000,000	1500	125,000,000	7000	625,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 6 2 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penema Bantuan Penyediaan Tempat Penampungan dalam masa tanggap darurat bencana	Keluarga	0	500	-	500	0	500	0	500	0	500	0	2500	0	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 6 2 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penema Bantuan Dukungan Psikososial pada masa tanggap darurat bencana	Keluarga	0	200	-	200	0	200	0	200	0	200	0	1000	0	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 6 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	Desa/ Kelurahan	4	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,000,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 6 2 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampanye Siaga Bencana	Jumlah Desa/ Kelurahan peserta sosialisasi dan pelaksanaan kampanye Siaga Bencana	Desa/ Kelurahan	4	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	500,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 6 2 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	Orang	25	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	25	100,000,000	25	500,000,000	Bidang Penanganan Bencana	Kab. Kutai
		1 6 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang dikelola	Persen	100	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	1,000,000,000	Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP	Kab. Kutai
		1 6 7 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Lokasi	4	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	20	1,000,000,000	Sekeloa Pengelolaan TMP	Kab. Kutai
		1 6 7 2 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TM P yang direhabilitasi	Lokasi	4	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	500,000,000	Sekeloa Pengelolaan TMP	Kab. Kutai

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab	Lokasi		
										2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode Renstra					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1	6	7	2	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMF yang dipelihara	lotas	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	500.000.000	Seksi Pengelolaan TMP	Kabupaten	
TOTAL													23.750.520.794		23.837.076.495		23.762.076.495		23.762.076.495		23.762.076.495		118.873.826.774		



Sebagai sebuah alat ukur keberhasilan maka indikator kinerja haruslah mampu mengukur dan menampilkan informasi secara jelas dan spesifik. Dengan demikian indikator harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan antara yang diukur dengan alat yang digunakan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD, dan memiliki batasan waktu yang jelas. Batasan waktu ini dapat disajikan dalam kurun waktu tahunan atau lima tahunan. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD
Review
Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI EKSISTING		TARGET KINERJA PADA TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial setingkat Impact								
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	74.8	76.0	78.0	79.0	81.0	82.0	84.0	84.0
2	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar (persen)	93	94	94	96	97	98	99	99
B.	Indikator Kinerja Program setingkat Outcome								
1	Predikat Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A
2	Presentase PSKS yang diberdayakan	84	84	88	90	92	94	94	94
3	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	N.A	N.A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	74	77	80	85	90	95	100	100
6	Cakupan Layanan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin non Potensial	N.A	100	100	100	100	100	100	100
7	Presentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan TMP yang di kelola	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana dalam Tabel. 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD
Review
Tahun 2016 – 2021

**Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TAHUN 2016 S/D 2021**

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	Predikat akuntabilitas kinerja	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Predikat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial							70	70	74	76	78	79	79
				Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan dibagi total layanan perkantoran dikali 100			%	100	100	100	100	100	100	100
							1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Jenis	45	45	45	45	70	70	275
							2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik (jenis)	Jenis	11	11	11	13	20	20	75
							3. Penyediaan Jasa administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga THL/ non PNS yang dibayar (OB)	Bulan	49	49	49	49	12	12	171
							4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/ operasional yang dibayar/ diperpanjang (unit)	Unit	44	44	29	44	50	50	217
							5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan (OB)	Bulan	12	320	320	320	12	12	984
							6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (Jenis)	Jenis	35	15	15	15	40	40	125
							7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan (eksemplar)	eksemplar	1825	1825	1808	1808	1800	1800	9041
							8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan (jenis)	Jenis	7	4	4	7	10	10	35
							9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (jenis)	Jenis	34	20	20	20	20	20	100
							10. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	porsi	771	200	200	200	500	500	1600

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
							11 Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat (buah)	buah	4500	900	900	900	700	700	4100
							12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah (OH)	OH	350	350	350	350	300	300	1650
							13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan internet (rek/bln)	bulan	12	12	12	12	12	12	60
							14 Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Arsip yang tertata	arsip	0	0	0	500	1000	1000	2500
				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana prasarana dikali 100			%	60	75	80	85	90	95	95
							1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	Unit	43	43	43	43	60	60	249
							2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	Jenis	35	5	5	5	10	10	35
							3 Lanjutan Pembangunan Panti Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Panti Sosial Penyandang Disabilitas yang selesai dibangun (unit)	Unit	1	0	0	0	1	0	1
							4 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab (unit)	Unit	4	0	0	0	5	5	10
							5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional (unit)	Unit	43	0	0	1	1	0	2
							6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (jenis)	Jenis	35	0	4	6	10	10	30
							7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	Unit	12	5	5	5	5	5	25
							8 Rehab Berat Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhab	bangunan	4	0	0	2	2	2	6
							9 Peringatan Hari-hari Besar Nasional lingkup tugas Dinas Sosial	Jumlah peringatan hari hari besar nasional (kegiatan)	Kegiatan	5	5	5	5	1	1	17

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
						10	Pemeliharaan Museum Perjuangan Merah Putih dan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Museum Perjuangan dan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (m2)	Bulan	3000	3000	3000	3000	10	10	9020
				Program peningkatan disiplin aparat	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin	Jumlah surat peringatan tahun N - jumlah surat peringatan tahun n - 1 dibagi jumlah surat peringatan tahun N - 1 dikali 100		surat		0	0	0	0	0	0	0
						1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah penerima perlengkapan pakaian dinas 125 stel	stel	0	0	0	0	125	0	125
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	rata-rata nilai kinerja SKP	Jumlah nilai SKP tahunan dibagi jumlah ASN		nilai		84	85	85	85	86	86	86
						1	Peningkatan Kapasitas SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional dan Pelayanan Sosial	Jumlah SDM Instruktur Rehabilitasi Vokasional (orang)	orang	0	0	0	0	12	12	24
						2	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	orang	0	0	0	0	8	8	16
						3	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Tim Bekias OPD yang terfasilitasi	orang	0		0	20	20	20	17
						4	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen	dokumen	0	0	0	0	2	2	75
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat konsistensi Renstra dan Renja	Jumlah kegiatan Renja Tahun N yang sesuai dengan Renstra dibagi jumlah kegiatan Renja Tahun N dikali 100		%		100	100	100	100	100	100	100
						1	Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian	dokumen	10	2	2	7	8	8	27

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
							2 Pengelolaan Data Kinerja Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Data pemerlu pelayanan dan penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial 18 kecamatan	dokumen	0	0	0	0	4	4	8
							3 Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial	Jumlah Dokumen	dokumen	1	0	0	1	0	0	1
							4 Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan	Jumlah Dokumen	dokumen	0				1	1	2
							5 Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	0				1	1	2
					Ketepatan pelaporan keuangan dan aset	Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan dikali 100			%	100	100	100	100	100	100	100
							1 Pengelolaan Arsip Internal Pemerintah Daerah	jumlah arsip Keuangan perangkat daerah yang dikelola	Jenis	0	0	0	0	5	5	10
							2 Inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang terinventarisir	Dokumen	2018				1	1	2018
					Prosentase penurunan temuan audit	Jumlah temuan (Inspektorat dan BPK) tahun N - jumlah temuan tahun n - 1 dibagi jumlah temuan tahun N - 1 dikali 100			%	0	0	0	0	100	100	100
							1 pengendalian sistem pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan	Jumlah dokumen pengendalian	dokumen	0	0			0	0	0
Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Prosentase jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan	Meningkatnya Penanganan PMKS Daerah	Cakupan Penanganan PMKS			Jumlah PMKS yang tertangani dibagi Jumlah PMKS yang ada x 100%			%	59	59.45	69.91	70.27	70.32	70.32	0
				Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS yang memerlukan penanganan x 100%			%		100	100	100	100	100	100

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
							1 pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial (orang)	orang		50	50	50	70	70	290
							2 Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial (orang)	orang	70		0	20	50	50	120
							3 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar (Stimulan)	Jumlah anak terlantar peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (anak)	orang	0	0	0	0	10	10	20
							4 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Jumlah Anak dan Lanjut Usia	orang	0	0	0	50	50	50	150
							5 Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis - kusta,tb paru.)	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	orang		5	20	30	50	50	155
							6 Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan (anak)	orang	30	30	30	40	40	40	180
							7 Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis (orang)	orang	30	35	20	25	50	50	180
							Penguatan Keberfungsian Sosial Keluarga dengan Anak Bermasalah Sosial	Jumlah Keluarga yang memperoleh penyuluhan dan bantuan	KK	60			0	0	0	60
							8 Fasilitasi Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) fungsi bantuan rehab oleh masyarakat langsung	Jumlah pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) (orang)	orang	0	0	0	0	25	25	50
							9 Rehabilitasi Vokasional Orang Dengan Kecacatan (ODK) melalui UPT Loka Bina Karya	Jumlah peserta rehabilitasi vokasional (Orang)	orang	20	10	10	10	20	20	70

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
						10	Pelayanan Sosial Harian (day care services) bagi tuna sosial di UPT Loka Bina Karya (LBK) Tenggarong	jumlah orang yang memperoleh pelayanan sosial dalam shelter (OH)	orang	0	0	25	80	80	80	265
						11	Fasilitasi dan Pemulangan Tuna Sosial	Jumlah pemulangan OT, eks napi, napza, trafficking, gepeng, PSK, ODHA dan masalah sosial ke daerah asalnya	orang		150	150	150	125	125	700
						12	Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif)	Jumlah penderita ODHA dan NAPZA	orang	60	0	0	0	25	25	50
						13	Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Susila (WTS)	Jumlah Tuna Susila yang direhabilitasi (Orang)	orang	589	0	0	0	50	50	100
						14	Pemunjang Kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah Anggota Tim yang terfasilitasi	orang	0			15	20	20	55
					Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun x 100%			%	0	0	0	0	120	120	240
						15	Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	orang	0	0	0	0	100	100	200

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%			%	100	100	100	100	100	100	100
						1	Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	orang	45	45	104	104	-	-	298
								Jumlah Pendampingan Program Keluarga Harapan	kali	-	-	-	-	250	250	500
						2	Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Jumlah Kelompok KPM PKH yang mengikuti P2K2	Kelompok	0	0	0	0	30	30	60
						3	Bantuan stimulan bagi KPM	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan UEP (usaha ekonomi Produktif)	KK	0	0	0	0	100	100	200
					Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dlm 1 th x 100%			%		100	100	100	100	100	100
						4	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	jiwa		19977	2508	3000	3000	3000	31485

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
							5 Peningkatan Kapasitas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah peserta peningkatan kapasitas TAGANA	orang	30	0	0	30	40	40	110
							6 Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah Pembentukan Kampung Siaga Bencana	orang	0	0	0	1	1	1	3
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	Jumlah PSKS Perorangan yang berperan aktif dalam Kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dibagi Jumlah seluruh PSKS Perorangan se kabupaten selama 1 tahun di kali 100			%	0	0	0	20	20	20	60
							Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		orang	18	18	18	18	0	0	54
							1 Fasilitasi Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan	Jumlah PSKS perorangan yang difasilitasi dibagi jumlah PSKS perorangan yang ada (PSM, Peksos, TKSIK)	orang	146	0	0	0	30	30	60
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	Jumlah PSKS Kelembagaan yang memperoleh bantuan fasilitas dalam 1 tahun dibagi PSKS Kelembagaan terdaftar dikali 100%			%		12	10	10	35	35	70
							2 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang memperoleh Pelatihan Manajemen pengelolaan LKSA	Lembaga	18	14	14	14	25	25	92

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
						3	Fasilitasi Pembinaan PUB dan UGB	jumlah Lembaga yang memperoleh pembinaan PUB dan UGB	Lembaga	0	0	0	0	25	25	50
						4	Fasilitasi Pengembangan PSKS Kelembagaan	Jumlah PSKS Kelembagaan lainnya (Karang taruna, LK3, Orsos) yang memperoleh fasilitas pengembangan	Lembaga	139	0	0	0	40	40	80
					Presentase Jumlah Veteran dan janda veteran yang memperoleh santunan	Jumlah Veteran dan janda veteran yang memperoleh Santunan dibagi Jumlah Seluruh Veteran dan Janda Veteran Kab. Kukar			%	100	100	100	100	100	100	100
						5	Pemenuhan Pelayanan Kesehatan veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah veteran dan janda veteran penerima santunan (orang)	orang	178	178	178	158	125	125	764
					Presentase pihak pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan dan restorasi Sosial	pihak pihak yang terlibat dalam K2KRS dibagi jumlah pihak yang seharusnya terlibat kali 100 %			%	0	0	0	0	100	100	100
						6	Penguatan Nilai-nilai Kejuangan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah peserta Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kejuangan, keberintisan dan kesetiakawanan dan restorasi sosial (SMP)	Peserta	193	0	0	0	50	50	100
				Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	Jumlah fakir Miskin yang tertangani dibagi total fakir miskin sesuai DT-PPM			%		80	85	90	90	90	90

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
							1 Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin (KUBE)	Jumlah Kelompok Fakir Miskin yang memperoleh bantuan Stimulan	KK	0	0	0	0	50	50	100
							2 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT (KK) JUMLAH PENERIMA	keluarga	0	223443	27443	31570	24000	24000	330456
							3 Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	dokumen	0	0	0	2	2	2	6
							4 Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Jumlah petugas pengelola data yang mampu mengelola data (Operator SIKS-NG desa dan Kelurahan)	orang	0	0	0	237	275	275	787
							5 Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas (Rakor Kesos)	Jumlah dokumen Perencanaan Penanganan fakir miskin berbasis komunitas	dokumen	0	0	0	1	1	1	3
							6 fasilitasi kerjasama pendampingan sosial	Jumlah Kesepakatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga	dokumen	0	0	0	0	25	25	50
							7 Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Bena Kampong Etam Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretariat Teknis SLRT Kab Kutai	Operasional sekretariat layanan rujukan terpadu yang ditindak lanjuti (bulan)	bulan	12	12	12	12	12	12	60
							8 Operasional Puskesmas Kelurahan	Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	kelurahan	0	0	0	44	50	50	144
							9 Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (pelatihan dan bantuan)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	orang	0	0	0	50	50	50	150
							10 Fasilitasi Keterampilan Usaha ekenomi prduktif bagi Keluarga Muda Mandiri (pelatihan dan bantuan KUBE)	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi KMM (KK)	Orang	0	0	0	0	50	50	100
							11 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesejahteraan Sosial	Jumlah Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bimbingan teknis	orang	711	0	0	100	150	150	400

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Program	Cara Hitung	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2016	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
											2017	2018	2019	2020	2021	
				Program Pembinaan Panti Asuhan Anak / Panti Jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dibagi Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100%			%	100	100	100	100	100	100	100
						1	Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	Jumlah anak asuh UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong penerima pelayanan sosial (anak)	orang	40	40	40	40	40	40	200

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra OPD merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu Lima tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

Renstra berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja dan rencana kinerja tahunan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Renstra ini dapat dipedomani dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tenggarong, 11 Oktober 2021


Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara,

H. HAMLY, SE
Pembina Tk. 1
NIP. 19640409 199803 1 013



Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara